

Daftar Pustaka

Buku

Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, PT Bumu Aksara, Jakarta, 2006.

Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaanya, Jaminan Sosial dan Pelaksanannya*, ctk.pertama, Mutiara, , Jakarta, 1989.

Lalu Husni, *Dasar-dasar hukum*, ctk.ke -9,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Ctk pertama, PT.Rajawali, Jakarta, 2008.

Michael Raper, *Negara Tanpa Jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia*, Trade Union Center, Jakarta, 2008.

Ridwan dan Harahap,NA, *Hukum Kepegawaian*, UII Press, Yogyakarta, 2018.

Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Ctk pertama, PT.Rajawali, Jakarta, 2008.

Jurnal dan materi

Jurnal Hukum Saraswati, Vol.2 No.2, Denpasar, 2020.

Jurnal Konstitusi, Vol.10 No.1, Mahkamah Konstitusi,2013

Makalah atau laporan penelitian

Nur Iman, “Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Kategori II Di Kabupaten Brebes Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatus Sipil Negara”, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019

Roni Wisnuaji, “Jaminan Terhadap Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (SJSN) Dalam Prespektif Hukum Islam”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

Peraturan perundang -undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Internet

Agus Muttaqin, *Mayoritas Pemda Belumm Daftarkan Pegawai Non-PNS ke BPJS, Ombudsman Minta Kepala Daerah Proaktif*, terdapat dalam <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mayoritas-pemda-belum-daftarkan-pegawai-Non-PNS-ke-bpjs-ombudsman-minta-kepala-daerah-proaktif>, diakses pada 26 Februari 2022

Ali Sugiarto, *Pemkab Gresik Berikan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk Tenaga untuk Tenaga Non-ASN*, terdapat dalam <https://bidik.news/2022/03/08/pemkab-gresik-berikan-jaminan-bpjs-ketenagakerjaan-untuk-tenaga-kerja/?noamp=available> , diakses pada 3 februari 2023

Badan kepegawaian Negera, *Data Tenaga Non ASN Yang Sudah Didata Oleh Admin Instansi*, terdapat dalam [Pendataan Non ASN \(bkn.go.id\)](https://bkn.go.id/Pendataan-Non-ASN), diakses Pada 8 februari 2023.

Shinta Milenia, *Pemerintah Akan Hapus Tenaga Honorer Tahun Depan, Bagaimana Kelanjutannya?*, terdapat dalam <https://www.kompas.tv/article/254339/pemerintah-akan-hapus-tenaga-honorer-tahun-depan-bagaimana-kelanjutannya> diakses pada 13 April 2022.

Agus Muttaqin, *Mayoritas Pemda Belumm Daftarkan Pegawai Non-PNS ke BPJS, Ombudsman Minta Kepala Daerah Proaktif*, terdapat dalam <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mayoritas-pemda-belum-daftarkan-pegawai-Non-PNS-ke-bpjs-ombudsman-minta-kepala-daerah-proaktif>, diakses pada 26 Februari 2022.

Badan kepegawaian Negera, Data Tenaga Non ASN Yang Sudah Didata Oleh Admin Instansi, terdapat dalam [Pendataan Non ASN \(bkn.go.id\)](http://bkn.go.id), diakses Pada 8 februari 2023.

Ali Sugiarto, Pemkab Gresik Berikan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk Tenaga untuk Tenaga Non-ASN, terdapat dalam <https://bidik.news/2022/03/08/pemkab-gresik-berikan-jaminan-bpjs-ketenagakerjaan-untuk-tenaga-kerja/?noamp=available> , diakses pada 3 februari 2023.

Humas, “*Sejarah Perjalanan Jaminas Sosial di Indonesia*”, terdapat dalam <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>, diakses 10 April 2023.

Garry Fischer Silitonga, “*Asas lex superior derogate legi inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan*”, terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html>, diakses 11 April 2023.